

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN ANAK
(Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum

Oleh

GALUH ANGGRAINI TUNGGGA DEWI

NPM:1321020177

Jurusan: Siyasah Syar'iyah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan kerugian bahaya terhadap anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang sering sekali terjadi dimasyarakat karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena faktor ekonomi, faktor lahir di luar nikah, faktor stress sosial, faktor isolasi sosial, dan faktor struktur keluarga. Disinilah peran Dinas PP dan PA Provinsi lampung yang berkewajiban melindungi anak dari tindak kekerasan karena anak adalah masa depan bangsa. Dan Dinas PP dan PA Provinsi Lampung mempunyai tujuan yakni untuk melindungi anak yang dibawah kemampuan dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun perorangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas PP dan PA Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak kekerasan anak dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas PP dan PA Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak kekerasan anak. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Peran Dinas PP dan PA dalam menanggulangi tindak kekerasan anak dan menganalisis Peran Dinas PP dan PA dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak di Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview dan metode dokumentasi metode analisis data yaitu setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti”

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas PP dan PA adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa program yakni dengan pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), itu termasuk tujuan yang ingin dicapai dari dinas PP dan PA Provinsi Lampung. Perlindungan Anak dalam perpektif hukum Islam merupakan kegiatan yang sejalan dengan hukum Islam, karena manusia dilarang untuk berbuat kekerasan terhadap anak karena anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan anak merupakan titipan Allah swt yang wajib dilindungi sehingga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Galuh Anggraini Tungga Dewi

NPM : 1321020177

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK
KEKERASAN ANAK**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H

Dr. Jayusman, M.Ag

NIP. 197112041997032001

NIP. 197411062000031002

Mengetahui

Ketua jurusan Siyasah

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
UPAYA MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN
ANAK** disusun oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi,
NPM.1321020177, Program Study : Siyasa Syar'iyah, telah
diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden
Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu/04 Juni 2018

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.


(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag


(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.


(.....)

Penguji II : Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.


(.....)

DEKAN


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ^ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

Artinya :

. . .dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,
Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka. . . QS Al An'am : 151



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis mempersembahkan pada orang-orang yang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya

1. Ayahanda dan Ibuku tersayang Hastaro dan Sudarningsih yang telah tiada, yang setiap do'akan ku haturkan terimakasih karena selama kau hidup kau ~~selalu menyemangati, menyayangiku, dan mengasihiku serta mendoakan~~ akan keberhasilanku.
2. Adinda Anindya Puspa Hapsari S.Pd., Adinda Sekar Arum Kinasih dan Ananda M. Fadlillah Al- Anshari yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta motivasi.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Galuh Anggraini Tungga Dewi dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 September 1995, merupakan anak kedua dari empat bersaudara putri dari pasangan Bapak Hastaro dan Ibu Sudarningsih.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

-
1. TK Sriwijaya Sukarame, Bandar Lampung diselesaikan tahun 2000
 2. SD Negeri 2 Waydadi, Bandar Lampung diselesaikan tahun 2007
 3. MTs Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2010.
 4. Kemudian melanjutkan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung Jurusan Akuntansi (AK) dan lulus pada tahun 2013.
 5. Tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa di IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah pada program studi Siyasah (Hukum Tata Negara) dan sekarang sudah berganti menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - 6.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Mahasiswa;
2. Hj Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I, dan Dr. Jayusman Djusar, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku ketua jurusan Siyasah dan Frenki, S.E.I., M.Si. selaku sekretaris jurusan, terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini;

5. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini;
6. Kepala Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung terimakasih telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat yang selalu mendukungku Ayu Destiani, Amd.,Rad
8. Orang-orang yang telah mendukung Yuni Astuti, Ines Wulandari, Novitasari, , Evi Ardianti, Suwantinah;
9. Untuk teman-teman sekelasku di Jurusan Siyasah angkatan 2013 yang tak dapatku sebut satu persatu yang selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya;
10. Teman-teman KKN 2016 kelompok 152 di Desa Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu:
11. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku;
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selaluku banggakan tempat kumenimba ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa depan.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Agustus 2017.
Penulis,

GALUH ANGGRAINI T.D
NPM. 1321020177



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan menurut Hukum	
Islam	16
1. Pengertian Anak	16
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	25
3. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam	29
4. Larangan Berbuat Kekerasan Terhadap Anak.....	33

B. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Menurut Hukum	
Positif.....	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	37
3. Hak-hak Anak	45
4. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan.....	54
5. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Kekerasan	58
C. Pihak yang Berkewajiban Melindungi Anak Dari Kekerasan	61
BAB III PENYAJIAN DATA	
A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63
B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	66
C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	67
D. Gambaran Tindak Kekerasan Anak di Provinsi Lampung	69
E. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung	73
BAB IV ANALISIS	
A. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak di Provinsi Lampung.....	88
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak di Provinsi Lampung.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99

B. Saran.....	101
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP dan PA Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam adalah menurut ulama fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.¹ Hukum Islam menurut Hasby Ashiddiqy adalah koreksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.² Selain itu, hukum Islam adalah ilmu yang menerangkan segalahukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang di gali dari dalil-dalil terperinci.³

¹ T.M. Hasbi Ashiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.27.

²Hasby Ashiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Mulia, 1993), h.44

³H.A. Djajuli, *Ilmu Fiqih, Cet-7*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.50.

Menanggulangi merupakan suatu cara yang dilakukan apabila sudah terjadi suatu kesaalahan agar tidak semakin parah.⁴

Tindak kekerasan anak merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi pada anak.⁵

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan persetujuan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung.⁶

Dari beberapa penjelasan diatas, dapatlah penulis tegaskan kembali bahwa yang dimaksud judul proposal skripsi ini adalah suatu kajian mengenai Tindak kekerasan anak yang akan dilakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara objektif, bahwa anak merupakan aset terbesar dan paling berharga bagi keberlangsungan hidup manusia serta bagi perkembangan suatu bangsa dan negara, maka kesejahteraan anak serta kepentingan terbaik baginya harus menjadi perhatian serius bagi setiap pihak, agar anak tidak menjadi korban daalam tindak kekerasan. Dengan demikian adanya

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online

⁵ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁶ Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas PP dan PA Provinsi Lampung.

kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini.

2. Secara subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak di Provinsi Lampung (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama difakultas syariah yaitu program studi Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Agama Islam mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-siakan. Jangan didustakan atau jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan-keturunan itu menjadi hak

anak, anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya.⁷

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan terdapat pada anak dan memiliki sifat serta cirri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan prilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh Negara dengan undang-undang. Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih akan hak-hak anak karena dibahu merekalah masa depan tersandang.

Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh kembang dengan baik menjadi pintar, hebat, berkualitas, memiliki kemampuan, bersikap bijaksana, beragama dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan peran orang tua maupun orang-

⁷Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h.13.

orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya. Selain itu peran pemerintah dan Negara pun berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Namun kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan cenderung mendapatkan perlakuan kasar serta disia-siakan oleh orang dewasa atau orang tuanya. Beberapa contoh kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu: Kasus yang dialami 42 siswita SD di Pulau Legundi yang mengalami salah satu contoh korban kekerasan Seksual. Siswa-siswi tersebut menjadi korban kekerasan seksual oleh Guru Olahraga sendiri. Diduga kasus tersebut telah terjadi sejak tahun 2011 lalu dan baru saja terungkap pada tahun 2017 ini dikarenakan ada salah satu siswa yang memberanikan diri melaporkan.

Salah satu kejahatan yang dapat menjadi perhatian publik saat ini adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini terjadi disekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka. Tindak kekerasan dan kejahatan terhadap anak sudah ada tingkat yang mencemaskan dan mengkhawatirkan. Bahkan di akhir tahun 2016 lalu, muncul kasus kekerasan dengan tingkat ektriminitas yang tinggi, yakni

sejumlah kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri, dan modus baru yang perlu diwaspadai kasus perdagangan anak untuk dijual organ tubuhnya.

Padahal anak-anak berhak mendapat perlindungan dimata hukum sama dengan orang dewasa pada umumnya. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak (UUPA) Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.⁸. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, sebagai berikut:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak dapat diselenggarakan dengan baik, prinsip yang menatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai

⁸Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana Anak Indonesia*, Retrika Aditama, Bandung, 2008, h. 33

“*oparamount of importence*” (memperoleh prioritas tinggi) dan setiap keputusan yang menyangkut anak.

3. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus mulai sejak dini dan terus menerus.⁹

Di dalam Al-quran banyak sekali tercantum ayat-ayat yang mengatur tentang larangan-larangan yang harus diatuhi dan ditinggalkan oleh seorang hamba Allah. Larangan yang diatur dalam Al-quran tersebut pada hakekatnya tiada lain adalah larangan untuk berbuat ke Dzaliman. Karena sesungguhnya perbuatan yang dilarang oleh Allah swt tersebut seluruhnya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan perbuatan Dzalim yang di haramkan di laukan oleh orang-orang yang beriman. Beberapa larangan yang diterapkan oleh Allah SWT dalam Al-quran bagi hamba-hambanya antara lain yang menyebut larangan untuk menyakiti orang lain (perbuatan dzalim) adalah sebagaimana firman Allah Quran surat al-Ahzab ayat 58 :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَنًا

وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

⁹Ibid, h 39

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

Di tengah keluarga, anak-anak juga mempunyai hak layaknya anggota keluarga lainnya. Terutama hak untuk meraih hangatnya kasih sayang dari orang tua ataupun penghuni rumah yang lain. Anak-anak merupakan bagian dari keluarga yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh, supaya pertumbuhan jasmani dan psikisnya baik. Semakin lemah seseorang

Melihat kasus ini, maka negara perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan anak karena tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia.

Membahas mengenai HAM berarti membahas dimensi kehidupan manusia. HAM¹⁰, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan dari martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan patut memperoleh apresiasi secara positif.

¹⁰ Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Frans Magnissu Seno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral dan Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h 121. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.¹⁰ Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Maka kita tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok manusia tertentu. Sudah melekat pada pengertian hak-hak manusia itu sendiri, bahwa hak-hak asai manusia harus di fahami dan di mengerti secara universal. Memerangi dan menentang hak-hak manusia.

Sepanjang tahun 2016, pemberitaan kekerasan anak tersebar di media televisi, internet, dan media lainnya. Kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua, guru dan orang-orang terdekat lainnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Penyebab kekerasan pada anak yang terekspos media berasal dari faktor eksternal atau sosial yaitu kemiskinan, masalah keluarga, masalah sosial, gangguan jiwa pelaku kekerasan, dan rendahnya pengetahuan pelaku kekerasan akan efek tindakannya.

Angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi karena lemahnya perlindungan pada anak. Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya memang ada namun implementasinya masih lemah. Masih banyak penyidik yang menggunakan KUHP dalam penanganan kasusnya sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya.

Berdasarkan Latar Belakang ini penulis tertarik dan optimis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Dinas PP dan PA Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas PP dan PA Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis peran Dinas PP dan PA dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak di Provinsi Lampung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap peran Dinas PP dan PA dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh islam.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

A. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian.

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹¹ Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah : “cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.”¹²

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang dimaksud dengan metode dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7 (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 24.

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 15.

dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹³ Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁴ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.¹⁶

2. Sumber Data

¹³ *Ibid.*, h. 32.

¹⁴ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 119.

¹⁵ Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 5.

¹⁶ Kaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :¹⁷

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu :

a. Metode interview

Menurut Margono, metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.¹⁸ sedangkan menurut Mardalis, Interview adalah teknik

¹⁷Abdurkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115.

¹⁸S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Jakarta: Rineka Cipta 2004), h. 165.

pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁹

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelaslah bahwa interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variable yang terbentuk tulisan,²⁰ atau ‘’mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, dan sebagainya’’,²¹ yang ada hubungannya dengan tema penelitian

4. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Diskriptif yaitu ‘’suatu prosedur penelitian yang menghasilkan

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal* Cet. Ke-7(Jakarta: Bumi Aksara,2004), h. 64.

²⁰ Koenjorodiningrat, *Op.Cit.*, h.46.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta), h. 23.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti” . Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.²²

Analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu : “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya, diantaranya bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan perlindungan yang baik.

Al-qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak shaleh keturunan para Nabi. Ada kisah nabi Ismail dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Lukman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua surat itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi lebih baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam al-Qur'an Allah swt. Pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak :

a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam al-Qur'an disebutkan

أَلَمْآلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*²³

Ayat di atas menyatakan bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak Sebagai Penyejuk Hati

Dalam al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati. Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2010), h. 299

“Anakku Permataku” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. Dan disebutkan dalam surat al-Furqon ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*Artinya : harta dan anak-anak adalah prhiasan kehidupan di dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*²⁴

c. Anak Sebagai Ujian

Allah berfirman dalam surat al-anfal ayat 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : ketahuilah bahwa anak-anakmu itu hanyalah ujian bagimu

25

Dan dalam surat al-Munafiqun ayat 9 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2010), h. 366

²⁵ Ibid, h. 180

Artinya : setiap orang tua yang beriman janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah²⁶.

Dalam perspektif al-Qur'an, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak orang tua di uji oleh Allah, apakah akan membawa anaknya ke jalan neraka atau jalan ke surga. Bila orang tua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang shaleh dan sholehah berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya jika terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak Sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan al-Qur'an dalam surat at-Taghabun ayat 14 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَلَحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati hatilah kamu terhadap mereka.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2010), h. 555

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasehati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya, seorang anak yang telak terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman beralkohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.

Anak adalah aset terbesar yang dimiliki umat, dan orang tua adalah orang yang diamanati menjaga dan mengelola meski anak pada dasarnya di lahirkan dengan membawa fitrah, keimanan dan juga tauhid,

namun orang tua lah yang berperan meluruskan di jalan islam atau menyimpangkannya ke jalan kesyirikan dan kek. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.

Kata anak dalam ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan. al-Qur'an sendiri mendefinisikan anak dengan istilah beragam yaitu :

1. *Al- walad*

Al-qur'an sering menggunakan kata *al-walad* untuk menyebutkan anak. Dalam bahasa Arab kata walad jamaknya awlad, berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik mufrad (tunggal), tatsniyah (dua) maupun jama' (banyak). Karena jika anak belum lahir, berarti ia belum dapat disebut sebagai al-walad atau al-mawlad, melainkan al-janin, yang secara etimologis terambil dari kata janna-yajunnu, berarti al-mastur dan al-khafi yakni sesuatu yang tertutup dan tersembunyi (dalam rahim sang ibu). Dalam al-Qur'an, kata walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga

kata walid, berarti ayah kandung, demikian pula kata walidah (ibu kandung).

2. *Ibn.*

al-Qur'an juga menggunakan kata *ibn* untuk menyebut anak. Lafaz *ibn* menunjukan pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat, contohnya adalah pernyataan tradisi orang-orang jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewariskan hartanya, tidak boleh dinikahi bahkan sebagainya.

3. *Bint.*

Dalam al-Qur'an ketika disebut *nint*, jamaknya *banat*, berarti merujuk pada pengertian anak perempuan. sehubungan dengan anak perempuan, al-Qur'an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang jahiliyah membandang dan memperlakukan anak perempuan. misalnya, mereka menganggap anak perempuan sebagai aib keluarganya sehingga mereka pun tega mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Al-Qur'an mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan. (Q.S An-nahl 58-59)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُتٍ ۖ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”²⁷

Lebih parah lagi orang-orang jahiliyah menisbatkan anak-anak perempuan untuk Allah. Sementara mereka lebih memilih anak laki-laki, padahal sesungguhnya Allah swt tidak memiliki anak, karena dia Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan.

4. *Dzurriyyah*

Al-qur'an juga menggunakan kata dzurriyyah untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, sebagian lagi berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orangtua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.

5. *Hafadah*

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2010), h. 273

Dalam al-Qur'an hafadah bentuk jamak dari hafid, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (al-asbath) baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. Kata tersebut merupakan derivasi dari kata hafadah yang berarti berkhidmah (melayani) dengan cepat dan tulus. Ini memberi isyarat bahwa anak cucu sudah semestinya dapat berkhidmat kepada orangtuanya secara tulus, mengingat orangtualah yang menjadi sebab bagi anak dan cucu terlahir ke dunia. Dalam konteks ini al-Qur'an menyatakan . (Q.S An_nahl 72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “ Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ” ²⁸

6. Al- thifl

Kata thifl mengandung arti anak dalam Q.S al-Nur 31 dan 59, al-Hajj:5, al-Mukmin: 67. Dalam ayat-ayat tersebut tersirat fase perkembangannya. Dalam fase perkembangan anak itulah orangtua perlu mencermati dengan baik, bagaimana perkembangan anak-anak mereka. Sehingga jika ada gejala-gejala yang kurang baik (misalnya gejala autisme), maka dapat diberikan terapi sebelum terlambat. Semakin baik orangtua

²⁸ Ibid, h. 274

memperhatikan masa perkembangan anaknya, maka insyaallah akan semaksimal baik pula hasil out putnya.²⁹

7. *Al-ghulam*

Kata *ghulam* berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun, pada fase tersebut perhatian orang tua harus lebih cermat. Sebab pada itulah mereka biasanya mengalami puber, krisis identitas, dan bahkan perubahan luar biasa.³⁰

Beragam definisi anak yang diuraikan diatas, memberikan isyarat bahwa betapa al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi sosial anak, baik yang menyangkut kedudukan anak, proses pendidikan dan pemeliharaan anak, hak-hak anak, hukum-hukum yang terkait dengan anak, maupun cara berinteraksi dengan baik.

Namun, fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh hak dari orang tua mereka seperti mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik dan sebagainya.

Intinya, anak merupakan bagian dari amanah Allah, di mana kalangan orang tua tidak dibenarkan melalaikannya, apalagi lari dari memikul amanah besar tersebut.

³⁰ Musthafa al-Adawy. *Fiqh Pendidikan Anak*. (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h 43.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Peran agama sangat di perlukan dalam mengenai Perlindungan Anak, anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya, al-Qur'an telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apa lagi karena takut sengsara (miskin). Seperti yang pernah disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151 :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١﴾



Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".³¹

Perlindungan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang perlindungan anak perlu dipahami secara utuh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2010), h. 148

Mughi, bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orangtua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah Allah.³²

Petunjuk secara tekstual al-Quran, yakni dipahami secara harfiyah atau apa arti yang dimaksudkan dalam al-Qur'an sedangkan secara kontekstual maksudnya adalah hikmah yang terkandung dari arti yang sebenarnya. Hal inilah yang memberikan ruang untuk menggali hukum Islam yang merupakan salah satu dari sumber hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum Islam memberi aturan bahwa yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi

³² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: KPAI, 2007), h 15.

nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.³³

Menurut Said Qutub orang tua tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa akan kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.³⁴

Berkaitan dengan hal ini, orang tua seharusnya tidak mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang meskipun belum bisa berfikir logis, anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran, apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa kendali. Dan perkataan kasar serta hardikan itu tidak disenangi anak, walau menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan anak bahwa kata-kata yang

³³ ³³ <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120> (19 April 2017)

³⁴ M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 45.

tidak lemah-lembut merupakan bukti ketidak senangan orang tua terhadapnya.³⁵

Semoga Allah menganugrahkan kepada kita akhlak yang baik, kesabaran yang tulus, ketabahan yang kokoh serta jiwa yang pemaaf. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengabulkan.

3. Hak-hak anak dalam Hukum Islam

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³⁶ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orangtua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi anak yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, kehormatan dan nasab/keturunan, pemeliharaan atas akal dan harta.

a. Hak pemeliharaan agama

Pemeliharaan hak atas agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan hifz al-din. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab orangtua. Agama yang dianut oleh

³⁵ Abdullah Muhammad Abdul Mu'thi. *Anakku Ayah dan Bunda Sayang Kamu*. (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 33.

³⁶ Ibid., h 45.

seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut orangtuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

b. Hak pemeliharaan nasab/keturunan

Salah satu bentuk pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal usul keturunannya. Allah menegaskan dalam surat al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

*Artinya: panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka dengan sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun maha penyayang.*³⁷

c. Hak pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental.

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2010), h. 418

Upaya penyelenggara pemeliharaan anak kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orangtua terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya.

Perhatian islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia. Pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

d. Hak pemeliharaan akal

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-‘aql* (pemeliharaan atas akal)³⁸

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam surat al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَلْفَسَّحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَلْفَشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

³⁸ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h 17.

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan member kelpangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu, “maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.”³⁹

Berdasarkan pemaparan ayat di atas terlihat betapa al-Qur'an mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.⁴⁰

e. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja, maupun rakyat biasa.

Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sanagt besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2010), h. 542

⁴⁰ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h 17.

jika tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal mampu maka akan memperoleh dosa yang sangat besar.

4. Larangan Berbuat Kekerasan Terhadap Anak

Tindakan dzalim yang dilakukan oleh para orang dewasa terhadap anak berupa perbuatan kasar dan kejam. Selama beberapa tahun belakangan ini semakin marak diberitakan sampai sampai terbentuknya komisi perlindungan anak, sebagai bentuk keprihatinan masyarakat akan tindakan seseorang diluar kendali sehingga menjadikan anak menderita.

Orang tualah yang pertama kali harus berperan penting mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah tentu dalam proses belajar ini anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan melakukan tindakan diluar kewajaran berupa tindakan fisik.

Tindakan kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan melakukan penganiayaan baik berupa tindakan fisik maupun perkataan kasar dalam islam biasanya disebut dengan kedzaliman. Pengertian dzalim lebih luas maknanya ketimbang kalimat yang disandarkannya. Kezaliman itu memiliki bentuk diantaranya syirik dan bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berkeprimanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan, dan

kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, dan ketidak adilan.

Para ulama mendefinisikan dzalim sebagai “menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya”. Oleh karena itu, jika orang tua melakukan kedzaliman kepada anaknya, berarti ia telah melakukan sikap yang tidak selayaknya pada anaknya., yang seharusnya tidak pada tempatnya dan layak dilakukan oleh orang tua. Karena perbuatan dzalim tersebut membuat anak yang didzalimi menjadi kecewa dan menderita terhadap atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Perbuatan mendzalimi seorang anak ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam.

Islam memerintahkan umatnya memiliki rasa kasih sayang , sayang sebagai hamba Allah terhadap sesama manusia, yang tentunya termasuk didalamnya kasih sayang orang tua kepada anak anak mereka, dimana anak-anak tersebut sesungguhnya sebagai titipan dari Allah yang wajib dipelihara, disantuni, dilindungi, dan diberikan kasih sayang. Rasa kasih sayang merupakan anugerah yang tidak ternilai yang datang dari Allah, dimana kasih sayang tersebut ditanamkan dalam hati anak manusia sebagaimana yang di firmankan Allah dalam surat Maryam ayat : 96

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.⁴¹

Perjalanan kehidupan keseharian, ada saja tingkah laku anak yang menggemaskan bahkan tak jarang menjengkelkan dan dapat memicu kemarahan orang tua, hal itu bisa terjadi karena ketidaktahuan mereka atukah karena ingin mendapatkan perhatian lebih sehingga membuat perilaku yang tidak diinginkan, atukah memang ada kesengajaan karena setiap anak dibekali dengan rasa ingin tahu yang besar akan segala sesuatu sehingga atas ketidaktahuan mereka sesekali dapat melanggar aturan-aturan atau norma yang menurut orang tua tidak baik. Adapun cara menghukum anak yang tidak dibenarkan dalam islam yaitu : memukul wajah, menampakkan kemarahan yang sangat, memukul di dalam keadaan sangat marah, bersikap terlalu kasar dan keras, memukul dengan benda keras sehingga berbekas.

B. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Anak

Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang, generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak menjadi salah satu modal dasar dalam

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2010), h. 312

pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan keberadaan anak harus mendapatkan pemenuhan dan perlindungan, sehingga perkembangannya dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Dalam membangun generasi yang berkualitas dan berdaya guna serta dapat menepis kekhawatiran tentang generasi bangsa yang hilang, maka perlunya mendorong anak untuk bersemangat dan berkemauan dalam belajar, mengembangkan dirinya sendiri sebagai pribadi anak seutuhnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Menurut Zakiah Drajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berperilaku dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.⁴²

⁴² Zakiah Drajat, 1983, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, h 101

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri belum lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dari pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³ Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

⁴³ Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, h. 448

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal Ibutir 2.

kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920 an, sesuai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam, dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Setelah perang, para perempuan dan anak-anak harus mendapati kenyataan pahit dimana suami atau saudaranya hilang bahkan juga ikut terluka. Para perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim-piatu. Akibat dari Perang Dunia I tersebut, munculah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang.

Salah satu orang diantara para aktivis perempuan itu adalah Eglantyne jebb, yang kemudian mengembangkan butiran-butiran pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *save the children fund international union*, yang antara lain berupa:⁴⁵

⁴⁵Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 29

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga
3. Anak harus disediakan saran-saran yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberipemahaman
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada semua umat.

Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).

Berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak, membutuhkan hasilnya dengan memasukkan hak-hak anak dalam Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 desember 1948.

Misalnya dalam pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 november 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional.⁴⁶

Indonesia sendiri sebagai anggota PBB, meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Berkaitan dengan penjabaran hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, telah dijabarkan sebelumnya yang pada prinsipnya membuat empat kategori hak-hak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan berpartisipasi (*participation rights*).⁴⁷

Sebagai negara yang pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

⁴⁶ Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa Cendikia, 2007), h. 41.

⁴⁷ Ibid., h 31.

negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁸

Selain itu, pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pembentukan KPAI ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan juga dilengkapi dengan beberapa dasar hukum yang menyangkut tentang perlindungan anak yakni :

Pertama: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

⁴⁸ Pasal 34 UUD 1945

Kedua: UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pasal 4 huruf (a) sampai (d) yakni dengan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindih pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Ketiga: UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 2 ayat (1) yakni setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan penyekapan pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan tujuan mengeksploitasi seseorang dapat dipidana dengan kurungan 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Keempat: Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang terdapat dalam pasal (1,2,3).

Kelima: Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada pasal 2 yakni menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak, mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan

tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak dan mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak,

Keenam: Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak pada pasal 2 huruf (a sampai c) yakni menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak, mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (trafficking) orang khususnya perempuan dan anak, mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafficking) orang khususnya perempuan dan anak.

Ketujuh : Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal (6) yakni jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi antara lain: layanan kesehatan, kelangsungan layanan pendidikan, layanan rehabilitasi sosial dan psikologis, akta kelahiran, layanan bantuan hukum dan layanan reintegrasi sosial.

Kedelapan : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam pasal (8) yakni perlindungan sementara serta dukungan dari semua pihak, bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum disetiap proses hukum, pelayanan kesehatan sesuai ketentuan medis dan pelayanan darurat, penanganan secara rahasia, pendampingan, tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal alternatif.

3. Hak-hak Anak

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan manusia diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan pasal 4 undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.⁴⁹ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.⁵⁰

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus bahasa Indonesiahak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah

⁴⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Didalam perjalanan sejarah tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui deklarasi HAM PBB. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara.⁵¹

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan

⁵¹ Sunggono, Bambang Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Mandar Maju 2009), h.70.

dan didengar tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁵²

Pasal 15 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Kejahatan seksual

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik masa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

⁵² Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Kemudian, Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Menurut Rahmita P. Soendjojo dan Irwato menjabarkan hak anak menjadi delapan, yaitu;

1. Hak pangan.

Minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekadar makanan atau jajan junk food hanya lantaran orang tua tak mau repot untuk masak. Bahkan sejak di kandunganpun anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Hal yang paling pokok dan harus diketahui oleh orang tua bahwa makanan terbaik untuk seorang bayi adalah ASI, untuk itu seorang bayi berhak mendapatkannya. Kecuali kondisi ibu memang benar-benar tak mungkin untuk member ASI semisal sakit.

2. Hak Sandang

Anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan harus mahal dan bermerek, tapi yang

terpenting pakaian tersebut bersih dan rapi. Biasakan pula agar anak selalu mengenakan pakaian secara sopan dan pantas.

3. Hak Tempat Tinggal

Anak-anak seharusnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun, sangat disayangkan saat ini perumahan bagi masyarakat kebawah masih terhitung memprihatinkan, tempat tinggal yang sempit dan kumuh.

4. Hak Pelayanan Kesehatan

Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar, baik itu dalam bentuk imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan ataupun berupa pengobatan atau penyembuhan saat ini POSYANDU sudah mulai rutin diadakan setiap bulan di dusun-dusun sebagai upaya untuk memenuhi hak anak berupa pelayanan kesehatan bagi anak.

5. Hak Pendidikan dan Mengembangkan diri

Anak berhak untuk bersekolah dan bilaperlu anak juga berhak mengikuti kegiatan di Sekolah, termasuk les tambahan, sebagai orang tua harus memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang adadalam dirinya dan orang tua wajib mendukung hal tersebut.

6. Hak Mendapatkan Perlindungan

Jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Perlindungan fisik, jangan pernah memukul apalagi menganiaya anak. Bahkan, menjewer dan mencubit dengan alasan menegakkan disiplin pun tak dibenarkan. Perlindungan emosional, jangan memaki-maki anak, menjulukinya dengan sebutan-sebutan negatif, ataupun ungkapan verbal lain yang bersifat melecehkan. Apalagi di usia balita, anak belum paham perilakunya tak benar di mata orang dewasa. Perlindungan seksual jangan memperlakukan tubuh anak seperti barang mainan sekalipun hal itu dilakukan dengan maksud bergurau. Beberapa cara untuk memberikan anak perlindungan secara seksual yakni;

- a. Ajarkan cara-cara menolak perlakuan buruk terhadap tubuhnya
- b. Jangan biarkan ia keluar kamar mandi dengan telanjang
- c. Jelaskan batas nyaman tak nyaman dan aman tak aman misal hanya boleh cium tangan dan pipi tapi lainnya tidak
- d. Jelaskan pula perbedaan ciuman dan pelukan sebagai ungkapan kasih sayang, persahabatan atau justru nafsu
- e. Biasakan tidur di kamar tertutup dan mengenakan baju atau selimut yang tidak mengumbar paha atau dada

7. Hak Bermain

Anak berhak untuk bermain dan menikmati *leisure time* nya. Banyak anak yang dipekerjakan sebagai pengemis sehingga tak sempat untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Padahal

dengan bermain, anak bisa mengembangkan kreatifitas dan potensi yang dimilikinya.

8. Hak berpartisipasi

Hak yang satu ini paling sering diabaikan orang tua karena menganggap anak kecil tak tahu apa-apa. Seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan haknya untuk berpartisipasi, dari menawarkan hingga memberikan pilihan makanan dan pakaian sampai aktivitas yang ingin dilakukannya.⁵³

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen Hukum Internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak-hak anak, mencakup hak-hak Politik, Ekonomi, dan Sosial serta tanggung jawab dari negara, masyarakat, dan orang tua untuk mencakup hak-hak itu.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁵⁴

1. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), “negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa

⁵³ <http://bola.kompas.com/read/2008/0723/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Hak-hak.Anak.Diakses> pada tanggal 28 januari 2018 pukul 11.57

⁵⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 29.

diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa

memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*).

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1): “negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, saran dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the child*).

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas

dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

4. Faktor Pemicu Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi pada anak. Dalam definisi tersebut kekerasan bukan hanya soal memukul, melukai, menganiaya, sampai membunuh, tetapi lebih luas dari itu.

Menurut Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: personal, sosial, dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yaitu: ⁵⁵

Pertama faktor pewarisan kekerasan antar generasi. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tubuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke

⁵⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak*. (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 56.

generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya ada 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua.

Kedua faktor Stres sosial. Stres sosial ditimbulkan oleh beberapa kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (unemployment), penyakit (illness), kondisi perumahan buruk (poor housing conditions), ukuran keluarga besar dari rata-rata (a larger-than-average family size), kelahiran bayi baru (the presence of a new baby), orang cacat (disabled person) di rumah, dan kematian (the death) seseorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (poverty). Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin karena beberapa alasan. Keluarga-keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Selain itu, pekerja sosial, dokter, dan sebagainya yang melaporkan

tindak kekerasan secara subyektif lebih sering memberikan label kepada anak keluarga miskin sebagai korban tindak kekerasan dibandingkan dengan keluarga kaya.

Ketiga faktor Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orangtua ini kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

Keempat faktor Struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabdian kepada anak. Misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai

tingkat tindakan kekerasan terhadap yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau di ambil, bilamana mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan untuk makan dan perumahan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggungjawab atas keputusan-keputusan tersebut.

Siti fatimah, seorang pemerhati masalah anak mengungkapkan bahwa terdapat enam kondisi yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak yaitu: Faktor ekonomi, Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar.⁵⁶ dan faktor masalah keluarga.

Masalah keluarga ini lebih mengacu kepada situasi keluarga khususnya hubungan orangtua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup menganiaya anaknya semata-mata sebagai pelampasan atau upaya pelepasan rasa jengkel dan amarahnya terhadap istri, contohnya Seperti perceraian, Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan

⁵⁶ Ibid., Hlm. 33

seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya.

Masyarakat banyak yang sulit memahami mengapa seseorang melukai anak-anak. Masyarakat sering beranggapan bahwa orang yang menganiaya anaknya mengalami kelainan jiwa. Tetapi banyak pelaku penganiayaan sebenarnya menyayangi anak-anak namun cenderung bersikap kurang sabar dan kurang dewasa secara pribadi. Menurut mereka hal tersebut sebagai salah satu dari pengajaran kepada seorang anak.

5. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Kekerasan

Kekerasan terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Anak yang mendapat kekerasan akan mengalami mimpi-mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecil.⁵⁷

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam dan menampilkan perilaku menyimpang dikemudian hari. Bahkan kombas PA mencatat anak berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan memiliki keinginan untuk membunuh ibunya.

⁵⁷ Dampak buruk kekerasan seksual terhadap anak,”artikel diakses 19 juli 2017 dari <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/13/01/16/mgpam4-ini-dampak-buruk-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh kekerasan terhadap anak (*child abuse*) ini dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar berikut ini. Rusmil mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi risiko: Usia yang lebih pendek, Kesehatan fisik dan mental yang buruk, Masalah pendidikan (termasuk dropt-out dari sekolah), Kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak, dan Menjadi gelandangan

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain: Cacat tubuh permanen, Kegagalan Belajar, Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain, Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain, Menjadi penganiaya ketika dewasa, Menggunakan obat-obatan atau alkohol dan Kematian.

Sedangkan menurut Richart J. Gelles tindak kekerasan anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas . luka fisik seperti memar-memar, goresan-goresan dan luka bakar hingga kerusakan otak, cacat permanen dan kematian. Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri

rendah, ketidak mampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi, dan gangguan belajar.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa dampak dari tindakan kekerasan terhadap anak begitu mengenaskan. Mungkin belum banyak orang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak. Beberapa anak ada pula yang demikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badannya turun drastis. Ketika mereka semakin besar, anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain; sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri. Namun, dampak yang paling menyedihkan adalah bahwa anak perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (dan menyebabkan beberapa di antaranya membenci pria), sedangkan anak laki-laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak untuk memukul istrinya.

Anak-anak memang selalu peka. Sering orangtua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu mempengaruhi anak. Sering dikatakan, anak merupakan cerminan dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan berseri. Sebaliknya jika mereka merenung dan sedih, biasanya telah terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orangtuanya. Sebagai wajah sosialisasi primer, di mana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orangtua sering

mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidaklah mengherankan jika anak-anak kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai ia dewasa. Karena kekerasan begitu sering terjadi dalam keluarganya, maka ia menganggap hal itu sebagai hal yang normal.

C. Pihak Yang Berkewajiban Dalam Melindungi Anak Dari Tindak Kekerasan

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, dimana Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pihak yang berkewajiban melindungi anak dari tindak kekerasan yaitu :

Pertama tanggung jawab orang tua dan keluarga. Yaitu Pertama; Tanggung jawab orang tua dan keluarga dimuat dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26 dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan memberikan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya beralih kepada keluarganya .

Kedua Tanggung jawab Masyarakat yaitu masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

perlindungan anak sebagaimana dilaksanakannya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Ketiga Tanggung jawab masyarakat Menurut KHA diatur dalam pasal 5; Negara-negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, bila dapat diterapkan, para anggota keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui dalam KHA, dengan cara yang sama dengan kemampuannya. Oleh karena itu masyarakat berkewajiban untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan tersebut.

Keempat tanggung jawab pemerintah dan negara dalam melindungi anak memiliki tanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ragam, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik. Pemerintah dan negara juga bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Dinas PP dan PA) Provinsi Lampung adalah Lembaga yang di bentuk oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak letaknya cukup strategis yang berada di jalan WR.Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung dan letaknya satu tempat dengan kantor Gubernur Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung sangat bermanfaat bagi

⁵⁸*Dokumentasi.*Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 januari 2018.

perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

⁵⁹ *Dokumentasi Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 januari 2018.*

Sementara itu dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat.
3. Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat lingkup Provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat.
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan, sebagai pendukung tugas teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁶⁰

A. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tinjauan objek tentang kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menetapkan visi yaitu terwujudnya kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan kesejahteraan keluarga bagi aparat dan publik.⁶¹ Penetapan visi ini telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Lampung. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang di emban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

1. Mewujudkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui partisipasi masyarakat.

⁶⁰*Dokumentasi*. Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 januari 2018.

⁶¹*Dokumentasi*. Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 januari 2018.

3. Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya untuk meminimalkan segala bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun bentuk kekerasan lainnya
4. Mendorong keberhasilan penyelenggaraan program keluarga berencana dan memfasilitasi terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ketahanan keluarga.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yakni akuntabel dan terintegrasi ⁶²

B. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja aturan dan gambar nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja agar mereka melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan menanamkan sifat tanggung jawab sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi masalah di pekerjaan.⁶³

Tugas dan tanggung jawab seorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah organisasi di Provinsi Lampung yang bertujuan untuk memantau, memajukan dan melindungi hak-hak anak serta mencegah berbagai kemungkaran pelanggaran.

⁶²Dokumentasi, Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 januari 2018

⁶³Dokumentasi.Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 januari 2018.

Susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdistribusi dari :⁶⁴

- a. Kepala Dinas : Dewi Budi Utami, S.E
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Yanti Hakim S.H.,MM
 - 2. Sub Bagian Keuangan; Oktiana S.E
 - 3. Sub Bagian Perencanaan; Nurul Awali Fauziah SS.i., M.Si
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi;
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi; Nida Efrina, S.Pd.
 - 2. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum; Sri Wulan, S.E
 - 3. Seksi Kualitas Keluarga; Diana Rosalina, S.Sos
- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi;
 - 1. Seksi Data dan Informasi Gender; Dra. Fitri Dendhi
 - 2. Seksi Data dan Informasi Anak;
 - 3. Seksi Partisipasi Masyarakat; Drs. Imam Firdaus
- e. Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi;
 - 1. Seksi PP dan KDRT; Elya Hartati, S.Sos
 - 2. Seksi PP dalam Ketenaga Kerjaan dan TPPO; Nyimas E.R. Intari, S.Sos

⁶⁴ *Dokumentasi*. Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 Januari 2018.

3. Seksi Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan darurat;
Prima Astuti, S.H., MM
- f. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, membawahi;
 1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak; Arcun Joni, S.Sos., MM
 2. Seksi Tumbuh Kembang Anak; Santiara, S.Sos., MM
 3. Seksi Perlindungan Anak; Anna Susi Suhartini, S.Sos.,MM
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

C. GambaranTindakKekerasanAnak di Provinsi Lampung

Anak adalah asset bangsa juga sebagai modal manusia dan investasi manusia yang harus dirawat dan dijaga, dipelihara serta dikembangkan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh anak tersebut juga sesuai dengan harapan pemerintah yaitu harapan yang positif untuk masa depan bangsa dan Negara, dan kita yang sekarang ini sudah tidak tergolong anak lagi tentunya akan tergantikan dengan anak-anak yang kita harapkan tersebut dan proses ini adalah proses alamiah.

Perkembangan hidup anak di lingkungan dimanapun anak tersebut berada secara normal terlihat dari perilaku rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan ini tidak/kurang dipahami oleh lingkungannya sehingga anak menjadi

sasaran ketidak tahuan tersebut yang mengarah kepada terjadinya kekerasan terhadap anak.

Istilah kekerasan berasal dari bahasa latin violentia, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, dan aniaya. Tindak kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain misalnya, pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain.

Kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh orang dewasa, mulai dari kekerasan terhadap anak kasus pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, penelantaran anak, melarikan anak di bawah umur, pengeroyokan, penipuan, dan kasus perbuatan tidak menyenangkan, dan setiap tahun persentasenya meningkat.

Pola pikir anak dengan orang dewasa yang ada di lingkungannya tentunya berbeda sehingga pemikiran terutama orang dewasa yang terkait dengan perbedaan ini perlu diperkecil dan bahkan dihilangkan melalui advokasi. Upaya mengatasi atau memperkecil terjadinya kekerasan terhadap anak kasus pemerkosaan, penganiayaan, penelantaran anak, melarikan anak di bawah umur, pengeroyokan, dan kasus tidak menyenangkan maka perlu dilakukan advokasi oleh organisasi/badan/lembaga/instansi yang terkait dan merupakan suatu upaya persuasi yang mencakup kegiatan-kegiatan penyadaran rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut kekerasan terhadap anak tersebut.

Perilaku keji orang dewasa sering luput dari pengamatan setiap orang, kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung masih saja terus terjadi dan kian

mengkhawatirkan baik yang terungkap ke publik maupun yang tersembunyi.⁶⁵ Dari riset penelitian, kekerasan pada anak dapat mencakup penyiksaan jasmani, penyiksaan emosi, penyiksaan seksual dan pengabaian. Unsur elemen yang mendorong terjadinya kekerasan anak di Provinsi Lampung yakni karena faktor perekonomian keluarga, karena adanya pewarisan kekerasan antar generasi, ketidakmatangan orang tua, kurangnya pemahaman bagaimana menjadi orang tua, kemauan yang tak realistis kepada kecakapan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua, isolasi sosial seperti orang tua yang tidak mengizinkan anak mengikuti kegiatan bersama teman sebayanya atau bayi dibiarkan dalam kamarnya sehingga kurang mendapatkan stimulasi dari lingkungan dan anak dikurung atau dilarang makansampai waktu tertentu, permasalahan rumah tangga serta permasalahan obat-obat terlarang atau alkohol.⁶⁶

Kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan berbagai kebijakan yang dimilikinya, ternyata belum menjamin adanya pemenuhan hak bagi anak di Provinsi Lampung. Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dari tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Kabid Hak Sipil, infor dan Partisipasi Anak, Arcun Joni, S.Sos., MM, Bandar Lampung, 23 Januari 2018.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Kabid Hak Sipil, infor dan Partisipasi Anak, Arcun Joni, S.Sos., MM, Bandar Lampung, 23 Januari 2018

Table
Data Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Lampung
2016-2017

No	Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	1695
2	Kekerasan Fisik	734
3	Psikis	672
4	Pembunuhan	851
5	Penelantaran	230

(Sumber : Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)

Melihat kasus-kasus diatas, maka Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan anak karena tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai penyimpangan dari Hak asasi manusia. Mengatasi tindak kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang mudah, pemerintah telah membuat undang-undang dan kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kekerasan. Namun dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut masih banyak ditemukan permasalahan lain yang menghambat proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arcun Joni, S.sos, MM selaku Kasi Hak Sipil, Infor dan Partisipasi Anak adapun permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak secara umum menyangkut beberapa hal yakni. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada bagian Sub Bagian Perlindungan Anak yang menangani permasalahan anak. Pegawai yang ada pada Sub bagian Perlindungan Anak hanya 9 orang, sementara

mereka harus menangani banyak kasus anak yang terjadi.⁶⁷ Masalah lain terkait dengan sumber daya manusia yaitu terbatasnya kemampuan pegawai dalam bidang informasi dan teknologi, seperti mengoperasikan komputer, mengakses informasi, dan lain-lain. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tersebut dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak dan memberikan layanan kepada masyarakat.⁶⁸

D. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan anak di Provinsi Lampung

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak kekerasan anak di Provinsi Lampung yakni bekerja sama dengan mitra yaitu dinas instansi seperti:

1. Dinas Sosial Provinsi Lampung

Upaya menangani masalah anak yang mengalami tindak kekerasan, tidaklah sepenuhnya bisa dilakukan secara persial atau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah semata melainkan perlu penanganan dan kepedulian bersama dan kerjasama semua warga, berkaitan dengan permasalahan tentang masalah anak yang menjadi korban kekerasan Dinas sosial juga ikut serta dalam menangani kasus kekerasan anak tersebut yakni melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan

⁶⁷Hasil wawancara dengan Kabid Hak Sipil, infor dan Partisipasi Anak, Arcun Joni, S.Sos., MM, Bandar Lampung, 23 Januari 2018

⁶⁸Hasil wawancara dengan Kabid Hak Sipil, infor dan Partisipasi Anak, Arcun Joni, S.Sos., MM, Bandar Lampung, 23 Januari 2018

perlindungan anak berbasis keluarga yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial, diantaranya adalah :

- a. Asesmen masalah dan kebutuhan anak, termasuk orang tua dan keluarga dan lingkungan sosial.
- b. Pendampingan sosial relawan sosial sampai anak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar dan meningkatnya tanggung jawab orang tua, dan keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak serta semakin berperannya lembaga kesejahteraan sosial anak.
- c. Verifikasi atau pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pengasuhan dan perlindungan orang tua atau keluarga, komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak.

Dinas Sosial Provinsi Lampung telah memberikan penampungan bagi anak yang menjadi korban pengabaian orang dewasa, panti tersebut yakni panti untuk balita dan anak yang di telantarkan oleh orang tuanya, panti bagi anak yang menderita psikotik dan panti bagi mantan pengguna narkoba.

Layanan yang diberikan dipanti-panti sosial ini meliputi perawatan dan asrama, kesehatan gizi, pembinaan mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimbingan latihan keterampilan, penampungan sementara, identifikasi hingga pembinaan awal rujukan.

2. Kepolisian Daerah Lampung

Kepolisian daerah lampung juga ikut serta bekerjasama dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak di provinsi lampung salah satunya yakni di bagian unit perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Untuk mendukung tugas unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak, maka pemerintah telah mengesahkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Polresta Bandar Lampung dituntut mampu membantu proses penyelesaian dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan perlindungan Anak sendiri diketuai oleh Kepala Unit PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidik. Menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok Unit PPA adalah melakukan penyidikan dan perlindungan terhadap tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*)
2. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (Perkosaan, Pelecehan, Cabul)
5. Adopsi Ilegal
6. Masalah Perlindungan Anak (Sebagai korban/tersangka)
7. Perlindungan korban, saksi, keluarga, teman.
8. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Dengan adanya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ini untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak Unit PPA mempunyai 2 upaya yakni upaya preventif yang dilakukan Unit PPA dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak, melalui sosialisasi di sekolah tentang pemahaman dan ajaran agar anak terhindar dari tindak kejahatan dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. Kemudian yang dilakukan Unit PPA dengan melaksanakan upaya represif yang telah dilakukan oleh Unit PPA dengan memberikan seseorang yang disangka, dilaporkan atau diadukan melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, melakukan penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, dan menetapkan sebagai tersangka agar selanjutnya dapat dilimpahkan kepengadilan.

3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Penyelenggaraan rujukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak merupakan proses kerjasama semua unsure terkait dalam sistem jaringan tersebut. Anak korban kekerasan pada umumnya datang ke fasilitas kesehatan diantar oleh orang tua, LSM atau polisi, karena cedera fisik akibat perlakuan kekerasan yang dialaminya. Penanganan dan rujukan kasus kekerasan terhadap anak perlu tindakan secara cepat dan tepat, oleh karena itu dibutuhkan kesiapan, pemahaman, dan keterampilan tenaga kesehatan, baik dari aspek medis dan psikologis.

Tenaga kesehatan harus sensitive gender dan mampu memberikan konseling , penanganan kasus kekerasan terhadap anak di fasilitas kesehatan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan kemampuan tenaga yang ada. Peran tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah menemukan kasus, menerima rujukan kasus, menangani kasus, dan merujuk kasus.

Upaya Dinas Kesehatan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yakni dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dari tingkat dasar hingga perorangan. Pelayanan kesehatan di tingkat dasar/primer yakni Puskesmas, puskesmas berperan menangani kasus kekerasan terhadap anak yang memiliki derajat ringan antara lain : luka ringan, cedera sederhana, cedera ringan/infeksi pada organ/saluran reproduksi, cedera ringan/infeksi pada anus, fraktur tertutup/terbuka ringan yang perlu tindakan P3K, trauma psikis ringan dan malnutrisi. Dalam

penanganan kasus kekerasan terhadap anak di tingkat puskesmas diawali dengan anamnesa untuk identifikasi kasus dan pengisian lembar persetujuan pemeriksaan yang meliputi antara lain dengan perawatan luka, reposisi fraktur, stabilisasi pernapasan, perbaikan keseimbangan cairan tubuh, pemberian nutrisi, konseling, pencatatan dan pelaporan kasus, pembuatan visum atas permintaan polisi dan rujukan.

Sedangkan dalam sarana pelayanan kesehatan ditingkat perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan dapat menerima, menangani kasus, kekerasan terhadap anak dan merujuk ke Rumah Sakit yang lebih mampu atau institusi terkait lainnya apabila diperlukan.

Mekanisme rujukan kasus kekerasan terhadap anak di Rumah Sakit tidak dibedakan menurut kelas rumah sakit baik kelas C, kelas B, atau kelas A, tetapi berdasarkan tersedia atau tidaknya Pusat Krisis Terpadu atau Pusat Pelayanan Terpadu. Pusat Krisis Terpadu (PKT)/Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah Pusat pelayanan bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang memberikan pelayanan komprehensif dan holistik meliputi penanganan medis dan medikolegal, penanganan psikologis, sosial dan hukum. Oleh karena itu di dalam PKT/PPT diperlukan tim yang terdiri dari dokter, perawat, pekerja sosial, psikolog dan ahli hukum, serta ruang konsultasi khusus. Maka ruang konsultasi dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada namun perlu dijamin kerahasiaan, keamanan dan kenyamanan.

Rumah sakit yang sudah mempunyai PKT/PPT, dapat memberikan pelayanan komprehensif dalam satu atap yang mencakup aspek pelayanan medis/mediko-legal, psikologis, sosial, hukum dan perlu bekerjasama dengan LSM, LBH, yang yang tergabung dalam jaringan kerja penanganan kekerasan terhadap anak. Sedangkan Rumah sakit yang belum mempunyai PKT/PPT kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani di Rumah Sakit dari derajat ringan sampai berat sesuai dengan ketersediaan sarana, prasarana sertakemampuan tenaga di Rumah Sakit. Tindakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Rumah Sakit diawali dengan anamnesis untuk identifikasi kasus dan pengisian lembar persetujuan pemeriksaan .

4. Lembaga Swadaya Masyarakat DAMAR

Lembaga ini merupakan organisasi berbentuk perkumpulan berbasiskan keanggotaan dan menaungi tiga lembaga eksekutif, yaitu Lembaga Advokasi Perempuan, Lembaga Advokasi Anak dan Institut pengembangan Organisasi dan Riset (IPOR). Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana kepada lembaga ini yang digunakan untuk Pelayanan dan Pendampingan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, dan Perda No. 6 Tahun 2006 Tentang Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perda No. 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak.⁶⁹

⁶⁹*Dokumentasi.Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 januari 2018.*

Kinerja yang dilakukan lembaga ini dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yakni dengan memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak, layanan yang dikembangkan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif yang bermakna : anak sejauh mungkin dihindarkan masuk kedalam ranah sistem peradilan pidana, penahanan atau pemenjaraan kepada anak haruslah menjadi alternatif terakhir, dan pengacara di lembaga ini juga bekerja untuk memberikan layanan konsultasi atau bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban atau saksi.

Pembinaan dibidang Perlindungan Anak dituangkan dalam kegiatan Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dengan membuat beberapa program program untuk penanggulangan tindak kekerasan anak di Provinsi Lampung yakni :

Pertama : Dengan adanya pembentukan Forum Anak Daerah, Forum Anak Daerah Provinsi Lampung adalah Organisasi resmi di bawah bimbingan dan binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dan bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak provinsi lampung. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial khususnya anak yang menjadi wadah partisipasi anak di Provinsi Lampung. Forum Anak Daerah juga sudah mempunyai SK dari Gubernur Lampung.

Forum Anak tersebut terdiri dari Forum Anak Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, yang terdiri dari anak-anak dibawah umur 18 tahun yang diketuai oleh Muhammad Hafis. Fungsi terbentuknya Forum Anak ini untuk memantau pemenuhan hak-hak anak, sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebayanya, menyuarakan pandangan dan aspirasi anak di Provinsi Lampung, mendorong anak-anak Lampung yang aktif untuk mengembangkan potensi serta minat bakat.

Forum Anak Daerah telah melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan temu anak Forum Anak Daerah Provinsi Lampung yang bertujuan agar bangkitnya Forum Anak Daerah Provinsi Lampung pada bulan 2-4 Mei 2017 lalu di Hotel Emrsia Bandar Lampung, temu anak daerah Provinsi Lampung merupakan kegiatan rutin dan penting yang diselenggarakan oleh Forum Anak Daerah Provinsi Lampung di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang mempertemukan seluruh duta anak dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, tujuan dari adanya kegiatan ini adalah sebagai ajang diskusi dan sharing antar Forum Anak Daerah kabupaten/kota dengan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung tentang permasalahan anak yang hangat dibicarakan di Provinsi Lampung, pemilihan duta anak Provinsi Lampung untuk mewakili Lampung dalam kegiatan Forum Anak Nasional (FAN) dan Kongres Anak Nasional (KAI), sebagai ajang pemilihan pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Lampung periode 2017-2019, kemudian mengikuti even-even Forum Anak Nasional di berbagai Provinsi, melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti di

sekolah-sekolah dalam memperingatai Hari Anak Nasional, dan melaksanakan aksi solidaritas bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan.

Kedua : Pembentukan Kota Layak Anak (KLA), Kota Layak Anak ialah Sistem Pengembangan suatu wilayah, suatu wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kegiatan program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Kota Layak Anak sudah dikembangkan sejak tahun 2006 dan diimplementasikan di Provinsi Layak Anak, Kab/Kota Layak Anak, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, RW Layak Anak, RT dan Keluarga.

Melihat dari persoalan yang sering muncul seperti maraknya kekerasan anak di Provinsi Lampung yang kian meningkat setiap tahunnya untuk mengantisipasi dampak perkembangan kota terhadap tumbuh kembang anak. Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak membutuhkan aturan turunan untuk implementasi perda tersebut sebagai payung hukum dari tindakan perlindungan anak di tingkat lingkungan sosial anak. Children Crisis Center (CCC) Lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak korban bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan pertemuan lintas Organisasi Prangkat Desa (OPD) terkait perlindungan anak korban kekerasan serta membahas instrument-instrumen yang harus terpenuhi terkait Upaya Provinsi Lampung menuju Kota Layak Anak (KLA).

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah menyelenggarakan Workshop Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dan kegiatan ini sudah berlangsung dan dilaksanakan di Hotel Novotel Jl. Jend. Gatot Subroto No. 136 Sukaraja, Bumi Waras Kota Bandar Lampung pada tanggal 7-8 September 2017 lalu, yang di ikuti oleh Bappeda, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Lembaga CCC.

Kota Layak Anak di kembangkan dengan memberikan pandangan anak seperti hal-hal yang menyangkut kehidupan anak perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, memberikan Hak hidup dan berkembang yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan dijamin, memberikan kepentingan terbaik bagi anak seperti semua tindakan yang menyangkut anak maka yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dan semua hak yang terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada pengecualian. Kota layak anak terbagi menjadi beberapa yakni: adanya Puskesmas Ramah Anak , Sekolah Ramah Anak dan Lingkungan Ramah Anak.

Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat segera membangun komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan untuk mempercepat Kota Layak Anak di setiap Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Ketiga : Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat

yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM itu sendiri merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan baru.

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Dalam situasi di perkotaan di mana kepadatan penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RT. Sementara dalam situasi di perdesaan di mana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun. Ruang Lingkup Kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyediaan pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti : Dinas PP dan PA, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kepolisian Sektor (Polsek), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Institut Sosial yang ada di Masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kota/kabupaten merupakan organisasi perwakilan, pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat di daerahnya. Organisasi tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelayanan dalam perlindungan anak yang melibatkan para pihak yang dilingkup kota/kabupaten dan lintas kecamatan dan desa/kelurahan, serta menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten/kota.

Dalam memfasilitasi pengembangan PATBM di desa/kelurahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh fasilitator yakni relawan aktivis pengembangan masyarakat dalam perlindungan anak yang menyatakan kesediaan dan diterima menjadi mitra kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendampingi pengembangan PATBM desa/kelurahan. Seorang fasilitator dapat mendampingi pengembangan PATBM di beberapa desa. Fasilitator kabupaten/kota bertugas:

1. Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang rencana pengembangan PATBM dengan Kepala Desa/Lurah/yang mewakili.
2. Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan PATBM.

3. Menjadi fasilitator dalam sosialisasi PATBM di Desa/Kelurahan dengan mendayagunakan potensi.
4. Mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan yang melaksanakan tugas:
 - a. Mengunggah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh-tokoh penggerak masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan pentingnya PATBM
 - b. Melaksanakan rekrutmen relawan melalui pertemuan-pertemuan warga
 - c. Memberikan pelatihan PATBM dan membangun tim kerja relawan aktivis PATBM, menyusun struktur dan pembagian tugas dan membangun komitmen
 - d. Melaksanakan pendampingan, bimbingan/konsultasi teknis kepada tim PATBM desa/kelurahan dalam membantu membangun dan mengembangkan kemampuan mereka dalam : menganalisis situasi, memetakan kerawanan dan permasalahan anak (khususnya kekerasan terhadap anak), serta potensi atau sumber: menyusun rencana kegiatan-kegiatan (sesuai dengan kesediaan dukungan sumber daya), melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan; menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dalam penanganan kasus, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut dan menyusun serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala

- e. Memfasitasi tim PATBM untuk mendapatkan dukungan pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota untuk pengembangan PATBM
 - f. Memfasilitasi pengembangan kapasitas/pelatihan lanjutan kepada para pengelola program di tingkat desa/kelurahan (baik dari aparat pemerintah maupun aktivis relawan PATBM di tingkat desa/kelurahan)
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan PATBM dan evaluasi hasil kegiatan PATBM desa/kelurahan dan kegiatan pengembangan PATBM di tingkat kabupaten/kota.
 6. Menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan PATBM di desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.⁷⁰

Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ini terdiri dari 120 kader yang sudah dilantik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 fasilitator tingkat nasional, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota ada 23 orang. Efektivitas pelaksanaan PATBM antara lain ditentukan oleh pengorganisasian yang mengatur secara jelas para pihak serta dukungan regulasi yang member kekuatan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan. Sinergitas regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat pusat, Provinsi, kabupaten hingga ketingkat desa/kelurahan dimana PATBM dilaksanakan harus dibangun dengan baik.

⁷⁰*Dokumentasi*.Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 23 januari 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sangatlah penting karena Lembaga tersebutlah yang juga bertugas menangani masalah salah satunya yakni anak yang mengalami tindak kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun secara sosial di tingkat daerah. Yang saya bahas saat ini yakni, karena adanya permasalahan kekerasan anak yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan melingkupi berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri, seperti melakukan pencegahan yakni dengan melaksanakan sosialisasi dengan mengundang beberapa kader yang ada di desa/kelurahan dan kota/kabupaten, untuk membentuk beberapa program salah satunya seperti program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk pencegahan dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dari tingkat lapisan bawah atau pada tingkat pertama.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berusaha melakukan upaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang pada prinsipnya telah berjalan sebagaimana ketentuan tersebut, namun upaya yang

telah dilakukan masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya fasilitas untuk menjalankan upayanya dan kesadaran masyarakat yang menjadi faktor meningkatnya anak yang menjadi korban kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai peran dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, diantaranya:

Pertama : Pelayanan pendampingan dan Bantuan Hukum dari lembaga yang khusus menangani permasalahan anak khususnya kekerasan terhadap anak yakni dengan mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan dari pihak yang menjadi korban kekerasan.

Kedua: Kepolisian daerah Lampung dalam memberikan bantuan hukum, Pelayanan Konseling yaitu berkonsultasi dengan konseler yang terdiri dari dua psikolog dan satu sarjana hukum,

Ketiga : Pelayanan Kesehatan, dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menangani korban kekerasan terhadap anak dengan memberikan fasilitas di bidang kesehatan pada tingkat dasar dan perorangan seperti Puskesmas yang tersedia di berbagai kecamatan dan Rumah sakit yang sudah mempunyai Pusat Krisis Terpadu(PKT)/Pusat Pelayanan Terpadu(PPT), tujuan adanya pelayanan terpadu ini khusus bagi korban yang mengalami kekerasan terhadap anak dan perempuan yang memberikan pelayanan komprehensif dan holistic meliputi pelayanan medis dan medikolegal, penanganan psikologis dan hukum.

Keempat : Bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk menampung anak yang mendapat ancaman dan Pemulangan dan reintegrasi bagi korban *trafficking* (perdagangan manusia), bekerjasama dengan Kepolisian untuk mengurus pemulangan anak korban *trafficking*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempunyai Program Untuk Mengantisipasi tindak Kekerasan Anak di Provinsi Lampung yakni :

1. Dengan adanya pembentukan Forum Anak Daerah, Forum Anak tersebut terdiri dari Forum Anak Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, yang terdiri dari anak-anak dibawah umur 18 tahun yang diketuai oleh Muhammad Hafis.
2. Pembentukan Kota Layak Anak (KLA), Kota Layak Anak ialah Sistem Pengembangan suatu wilayah, suatu wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kegiatan program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Kota Layak Anak sudah dikembangkan sejak tahun 2006 dan diimplementasikan di Provinsi Layak Anak, Kab/Kota Layak Anak, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, RW Layak Anak, RT dan Keluarga.

Kota Layak Anak di kembangkan dengan memberikan pandangan anak seperti hal-hal yang menyangkut kehidupan anak perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, memberikan Hak hidup dan berkembang yang

melekat pada diri setiap anak harus diakui dan dijamin, memberikan kepentingan terbaik bagi anak seperti semua tindakan yang menyangkut anak maka yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dan semua hak yang terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada pengecualian. Kota layak anak terbagi menjadi beberapa yakni: adanya Puskesmas Ramah Anak , Sekolah Ramah Anak dan Lingkungan Ramah Anak.

3. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini terdiri dari 120 kader yang sudah dilantik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 fasilitator tingkat nasional, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota ada 23 orang.

Program tersebutlah yang dapat mengantisipasi tindak kekerasan anak di Provinsi Lampung, dan telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah yang terkait dengan program tersebut.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada prinsipnya telah berjalan sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun masih belum maksimal disebabkan kurangnya fasilitas untuk menjalankan upayanya serta kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadi faktor kenaikan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak

Perlindungan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang perlindungan anak perlu dipahami secara utuh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al Mughni, bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.

Islam memerintahkan umatnya memiliki rasa kasih sayang, rasa kasih sayang merupakan anugerah yang tidak ternilai dan datangnya dari Allah Swt. Islam merupakan agama yang sistem hidupnya menyeluruh seperti aspek aqidah dan akhlak.

Islam bukan hanya menjaga Undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani. Artinya, pengentasan terhadap nasib mereka bukan semata diserahkan kepada Undang-undang, tetapi diserahkan kepada masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan yang tulus dan keterlibatan langsung pemerintah dan masyarakat dalam membenahi kehidupan anak korban kekerasan merupakan kerjasama yang diharuskan untuk saling menunjang antara lainnya.

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karena yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai asset orang tua dan asset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap

perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindari diri dari kekerasan, dan lain-lain.

Seperti diketahui bahwa Islam memberi aturan bahwa yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Peran agama sangat di perlukan dalam mengenai Perlindungan Anak, anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya, al-Qur'an telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apa lagi karena takut sengsara (miskin).seperti yang pernah disebutkan dalam surat al anam ayat 151;

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Hak anak yang telah diatur dalam Islam sejak anak dilahirkan bahkan sejak anak tersebut dalam kandungan, telah menetapkan hak-hak anak tersebut yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, hak untuk bermain.

Berkaitan dengan hal ini, orang tua seharusnya tidak mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang meskipun belum bisa berfikir logis, anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran, apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa kendali. Dan perkataan kasar serta hardikan itu tidak disenangi anak, walau menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan anak bahwa kata-kata yang tidak lemah-lembut merupakan bukti ketidak senangan orang tua terhadapnya

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang melakukan upaya terhadap penanganan masalah anak yang menjadi korban kekerasan dengan berbagai upaya seperti yang ada di dalam Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yaitu dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Namun, kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kekerasan seksual, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan perhatian dari keluarganya, anak yang ditinggal orang tuanya (yatim), anak akibat perceraian

orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga karena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak, selain merupakan asset keluarga, juga sebagai asset bangsa. Sebenarnya Negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Di sinilah peran agama dalam hal ini Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan perlindungan terhadap anak.

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sesuai apa yang diamanahkan oleh agama Islam dalam menjaga hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan yakni dengan :

Pertama : Hak pemeliharaan agama dengan memelihara hak atas agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan hifz al-din. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab orangtua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut orangtuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

Kedua : Hak pemeliharaan nasab/keturunan dengan salah satu bentuk pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas

jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal usul keturunannya.

Ketiga : Hak pemeliharaan kesehatan yakni dengan cara memelihara kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggara pemeliharaan anak kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orangtua terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya.

Keempat : Hak pemeliharaan akal dengan menyelenggarakan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al- 'aql* (pemeliharaan atas akal).

Kelima : Hak Sosial Ekonomi dengan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja, maupun rakyat biasa.

Dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjaga anak untuk berperilaku lembut dan memberi kasih sayang kepada anak dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak apapun alasannya, bukankah anak itu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT yang sangat berharga dan harus dijaga karena anak itu titipan Allah SWT.

Masalah anak yang menjadi korban Kekerasan tersebut tetap mendapatkan haknya melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak lalu kemudian mendapatkan pendampingan khusus oleh Lembaga itu sendiri dan menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak-hak anak yang mengalami masalah kekerasan baik menurut agama maupun Undang-undang karena anak adalah penurus masa depan yang harus dijaga dan dilindungi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam menanggulangi Tindak Kekerasan Anak di Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan melingkupi berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri yakni dengan meningkatkan kesadaran dan sikap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara melalui sosialisasi, edukasi, dan Informasi. Disamping itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melakukan pengurangan resiko kekerasan anak dengan mengeluarkan beberapa program yang telah mereka buat yakni : *Pertama* : dengan adanya pembentukan Forum Anak Daerah, Forum Anak tersebut terdiri dari Forum Anak Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, yang terdiri dari anak-anak dibawah umur 18 tahun yang diketuai oleh Muhammad Hafis.

Kedua : Pembentukan Kota Layak Anak (KLA), Kota Layak Anak ialah Sistem Pengembangan suatu wilayah, suatu wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kegiatan program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Kota Layak Anak sudah dikembangkan sejak Tahun 2006 dan diimplementasikan di Provinsi Layak Anak, Kab/Kota Layak Anak, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, RW Layak Anak, RT dan Keluarga.

Ketiga : Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini terdiri dari 120 kader yang sudah dilantik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 fasilitator tingkat nasional, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota ada 23 orang.

2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam perspektif hukum Islam merupakan Lembaga Perlindungan Anak yang kegiatannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini ada ketentuannya dalam hukum Islam bahwasannya umat manusia dilarang melakukan tindak kekerasan/mendzolimi anak-anak dikarenakan anak merupakan amanah dari Allah Swt yang harus dijaga dan dilindungi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu solusi dari adanya hambatan dalam pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, kami menyarankan agar dilakukan penambahan pegawai dan dilakukan penguatan kelembagaan khususnya pembekalan tentang tugas dan fungsinya, agar mereka dapat lebih . Dan masalah perlindungan anak bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan negara tetapi orang tua dan juga masyarakat. Diharapkan masyarakat dan orang tua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.
2. Bagi aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak kasus kekerasan anak agar berkurangnya jumlah kekerasan anak di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqi Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- H.A. Djajuli. Ilmu Fiqih. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Zakariya Ahmad Al Barry. Hukum Anak-anak dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Bandung: Diponogoro, 2010.
- Mardalis. Metode Penelitian suatu pendekatan proposal Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kartini Kartono. Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. Ke-VII. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Koenjorodiningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Retrika Aditama, 2008.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- Irawati Istadi. Mendidik Dengan Cinta. Jakarta: Pustaka Inti, 2003.
- Musthafa al-Adawy. Fiqih Pendidikan Anak. Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Abdullah Muhammad Abdul Mu'thi. Anakku Ayah dan Bunda Sayang Kamu. Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.

Zakiah Drajat. Kesehatan Mental. Jakarta, Inti Idayu Press, 1983.

Hilman Hadikusuma. Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta: Fajar Agung, 1987.

Setiawan Widagdo. Kamus Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Abu Huraerah. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendikia, 2007.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak. Bandung: Citra Aditya, 1999.

M.Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

<http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/13/01/16/mgpam4-ini-dampak-buruk-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.

